

## DINAMIKA HUBUNGAN MUHAMMADIYAH DAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA

Ahmad Sholikin

Pengajar Pada Prodi Ilmu Politik dan Pemerintahan - Universitas Islam Darul Ulum

Email: [akhmad.sholikin@gmail.com](mailto:akhmad.sholikin@gmail.com)

### ABSTRACT

*Muhammadiyah's contact with political parties in actualizing their ideas and ideals will be discussed in this chapter. Muhammadiyah's involvement with political parties from the pre-independence era until now is divided into 4 patterns of relations. If it is analogous to Muhammadiyah's relationship with a Political Party like a marriage, there will be four "Marriage" models between Muhammadiyah and the Political Party. First is "Official Marriage" with Muhammadiyah being a special member of Masyumi, second is "Siri Marriage" when Muhammadiyah becomes the initiator of the establishment of Parmusi in Tanwir Ponorogo. Third "Mut'ah Marriage (Contract)" when some Muhammadiyah administrators were involved in the establishment of the National Mandate Party (PAN), to the point of disappointment that gave rise to the Sun Nation Party (PMB). The fourth most recent model is not the "Marriage" that takes place, but the "Divorce" of the Islamic purification and reform organization with political parties as formulated in Tanwir Denpasar (2001).*

**Keyword:** Muhammadiyah, Political Parties, Indonesia

### PENDAHULUAN

Kelahiran Muhammadiyah pada tahun 1912 menunjukkan bahwa organisasi ini dari segi kesejarahan memiliki pengalaman yang lebih banyak dibandingkan dengan negara Indonesia yang baru berdiri pada tahun 1945. Walaupun Muhammadiyah tidak pernah mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah organisasi politik, namun dengan usianya yang lebih tua dari usia Republik ini maka Muhammadiyah selalu aktif dalam pengumpulan dan berbagai pergulatan pentas politik kebangsaan nasional. Muhammadiyah terlihat terlibat dalam pentas politik nasional karena keterlibatan para pimpinan elite nya dan selalu dijalankan dalam bingkai *amar ma'ruf nahi mungkar* atau yang sering diartikan dengan bahasa yang populer yaitu *high politics*. Perkembangan pentas politik Islam dalam negara tidak bisa lepas dari peran

politik Muhammadiyah, bahkan kebangkitan nasional juga merupakan bagian dari mata rantai persinggungan Muhammadiyah dengan negara.

Dalam merespons sebuah isu-isu tertentu, para elite Muhammadiyah sering mengalami perbedaan dan silang pendapat. Pernyataan diatas semakin menguatkan bahwa di dalam tubuh Muhammadiyah terdapat faksi-faksi yang selalu berhadapan dan saling berbeda, faksi politis vs faksi non politis, faksi kultural vs faksi kultural, bahkan dalam pemikiran Islam pun terdapat perbedaan yaitu, faksi progresif dan faksi konservatif. Perpecahan dalam tubuh sebuah organisasi merupakan sesuatu yang biasa, apalagi ketika melihat semakin banyaknya partai-partai politik yang mengalami perpecahan dalam akhir-akhir ini.

Fakta seperti ini menjadi menarik untuk diteliti bahwa elite dalam tubuh internal Muhammadiyah sendiri mengalami perbedaan pendapat sehingga bagaimana bentuk netralitas politik Muhammadiyah dalam setiap moment politik elektoral selalu mengalami pemutakhiran sikap politiknya. Ditengah terjadinya berbagai pandangan tersebut tetapi Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi yang sudah berumur lebih tua dari bangsa Indonesia, selalu menunjukkan eksistensi nya dalam melintasi abad kedua tersebut. Hal ini tidak mengejutkan buat Kim Hyung-Jun *Profesor Antropologi Budaya Kangwon National University Korea Selatan peneliti Muhammadiyah, dalam kesimpulan penelitiannya tentang Muhammadiyah dia mengatakan bahwa* sebenarnya tidak ada rahasia yang susah dipahami di balik satu abad Muhammadiyah. Apa yang berada di baliknya adalah hal yang mendasar, yaitu tradisi demokrasi, egalitarianisme, serta otonomi yang dijaga dan dilaksanakan oleh warga Muhammadiyah.

Pada masa awal berdirinya Muhammadiyah Ahmad Dahlan menjadi tokoh sentral dan panutan bagi para pengikutnya, segala yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan menjadi cerminan dari gerakan Muhammadiyah. Kaitannya dengan hal politik, Ahmad Dahlan ikut aktif dalam beberapa gerakan politik atau gerakan yang bernuansa politis, seperti Jamiat Khair yang berdiri pada 17 Mei 1905, Budi Utomo (BU) berdiri pada 20 Mei 1908 dan juga Syarekat Islam (SI) yang berdiri pada 10 November 1912. Ahmad Dahlan hanya menjadi anggota biasa dalam Jamiat Khair, tetapi dalam Budi Utomo Ahmad Dahlan diminta menjadi guru agama bagi para anggotanya yang notebene berasal dari lulusan sekolah bentukan Belanda. Kesempatan ini benar-benar dimanfaatkan oleh Ahmad Dahlan untuk mengarahkan cita-citanya dalam dunia pendidikan dengan memasukkan pendidikan agama dalam sekolah-sekolah negeri buatan pemerintahan Belanda. Hubungan yang baik antara Dahlan dan Budi Utomo telah memudahkan bagi Dahlan untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah, dimana beberapa

anggota Budi Utomo seperti R. Sosrosoegondo dan Mas Radji ikut membantu dan belakangan memilih untuk menjadi anggota dalam Muhammadiyah<sup>1</sup>.

Netralitas politik Muhammadiyah diartikan sebagai tidak bersinggungannya Muhammadiyah secara struktural terhadap sebuah partai politik, menjadi kerangka untuk melihat bagaimana kiprah Muhammadiyah dalam mempertahankan dirinya sebagai sebuah organisasi sosial keagamaan. Tidak seperti halnya dengan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah merupakan persyarikatan yang tidak pernah terlibat langsung dengan politik praktis. Jika NU pernah menjadi partai politik yakni Partai NU (1955), maka Muhammadiyah tidak pernah menjadi sebuah partai politik dalam kondisi apapun. Kebersinggungan Muhammadiyah dengan Partai Politik dalam mengaktualisasikan gagasan dan cita-citanya akan dibahas dalam bab ini. Keterlibatan Muhammadiyah dengan Partai Politik dari era pra kemerdekaan hingga saat ini terbagi menjadi 4 pola hubungan. Jika dianalogikan hubungan Muhammadiyah dengan Partai Politik seperti sebuah pernikahan maka akan ada empat model "Pernikahan" antara Muhammadiyah dengan Partai Politik. Pertama adalah "Pernikahan Resmi" dengan Muhammadiyah menjadi anggota istimewa Masyumi, kedua "Pernikahan Siri" ketika Muhammadiyah menjadi inisiator berdirinya Parmusi dalam Tanwir Ponorogo. Ketiga "Pernikahan *Mut'ah* (Kontrak)" ketika sebagian pengurus Muhammadiyah terlibat dalam pendirian Partai Amanat Nasional (PAN), hingga muncul kekecewaan yang memunculkan Partai Matahari Bangsa (PMB). Model paling akhir yang keempat bukan "Pernikahan" yang terjadi, melainkan "Perceraian" organisasi pemurnian dan pembaruan Islam itu dengan parpol sebagaimana dirumuskan dalam Tanwir Denpasar (2001).

### ***"Pernikahan Resmi" Muhammadiyah dan PII, MIAI, Masyumi***

Dorongan untuk melakukan perubahan orientasi Muhammadiyah dari ranah kultural keranah struktural disebabkan karena adanya dorongan internal dari kepemimpinan Mas Mansur dan tuntutan keadaan eksternal pada masa itu, dimana kekuatan partai politik melemah sedangkan suhu dan situasi politik cenderung panas dan meningkat. Pribadi Mas Mansur yang cenderung berminat dalam dunia politik praktis telah berhasil meletakkan konvensi partisipasi politik Muhammadiyah di pentas politik nasional dan kemudian menjadi tradisi yang berlaku bagi Muhammadiyah untuk periode kepemimpinan yang selanjutnya.<sup>2</sup> Selain dari dorongan internal pribadi Mas Mansur selaku pimpinan Muhammadiyah yang

---

<sup>1</sup> Akira Nagazami, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia Budi Utomo 1908-1918*. (Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 1989) Hlm. 123-124

<sup>2</sup> Arifin, MT. 1990. *Muhammadiyah Potret yang berubah*. Surakarta : Institut Gelanggang Pemikiran Filsafat Sosial Budaya dan Pendidikan. Hlm. 115

condong ke politik, pimpinan lain seperti Haji Sudjak, Faried Ma'ruf dan Abdul Kahar Muzakir juga memiliki kecenderungan yang sama. Dua orang terakhir adalah pimpinan muda Muhammadiyah yang energik yang mampu memberikan angin segar kepada Muhammadiyah karena keduanya baru saja menyelesaikan studi di Timur Tengah.<sup>3</sup>

Disamping mendirikan MIAI, Muhammadiyah juga menyadari bahwa tidak mungkin dapat memenuhi semua kepentingan dan aspirasi dari Muhammadiyah dalam berdakwah dikalangan terpelajar atau intelektual yang berpendidikan Barat. Dengan melihat kondisi yang seperti itu maka Mas Mansur mendirikan Islam Studie Club pada Juli 1938 yang merupakan sebuah forum diskusi yang menjembatani antara kaum intelektual Muslim dan kaum Muslim. Islam Studie Club ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan Islam dan juga untuk mempercepat kerjasama antara kaum Muslim dengan intelektual Muslim demi kepentingan Islam di Indonesia.

Islam Studie Club inilah yang akhirnya akan menjadi embrio bagi lahirnya Partai Islam Indonesia (PII) pada 4 Desember 1938.<sup>4</sup> Pimpinan Pusat dalam PII didominasi oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah dimana seluruh anggota komisisarisnya adalah tokoh Muhammadiyah. Selain itu, Wiwoho, Dr. Sukiman dan Ahmad Kasmat juga dikenal memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Muhammadiyah. Aktivitas Mas Mansur yang melibatkan dirinya dan Muhammadiyah secara kelembagaan terjun langsung dalam kegiatan politik MIAI dan PII telah menjadikan Mas Mansur sebagai pemimpin Indonesia yang paling terkemuka pada masa itu. Bahkan Mas Mansur juga melibatkan dirinya kedalam Gabungan Politik Indonesia (GAPI) yang merupakan federasi dari organisasi-organisasi politik Indonesia yang terbentuk pada bulan Mei 1939. Bahkan pada tahun 1941 GAPI dan MIAI bersepakat untuk mendirikan Majelis Rakyat Indonesia (MRI), mayoritas anggotanya memilih Mas Mansur sebagai ketua MRI. Tetapi Mas Mansur lebih memilih tetap menjabat sebagai Pimpinan Besar Muhammadiyah dan menyerahkan kepemimpinan GAPI kepada Mr. Sartono. Melihat peran Muhammadiyah yang sangat menonjol pada panggung politik nasional pada saat itu, khususnya dalam politik Islam, M. C. Ricklefs sampai menyatakan bahwa "...sedemikian jauh

---

<sup>3</sup> Dan orang tersebut adalah Farid Ma'ruf dan Abdul Kahar Muzakir, keduanya adalah lulusan Al Azhar Kairo yang aktif dalam gerakan mahasiswa disana. Farid Ma'ruf pulang ke Indonesia tahun 1934, sedangkan Abdul Kahar Muzakir kembali ke tanah air pada 1937. Khusus untuk Abdul Kahar Muzakir di cap oleh Pemerintahan Kolonial Belanda sebagai anti kolonialis karena pernah menjadi anggota Perhimpunan Indonesia (PI) dan pernah mewakili Indonesia pada Konferensi Muslim Dunia di Palestina tahun 1932. Lihat Alfian, *Muhammadiyah The Political Behavior of A Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Hlm 321-322.

<sup>4</sup> Ibid. Hlm 333

dapat dikatakan bahwa sejarah Islam Modern di Indonesia sesudah tahun 1925 adalah sejarah Muhammadiyah.<sup>5</sup>

Sepak terjang dari Mas Mansur yang menjabat sebagai Ketua Umum Muhammadiyah sekaligus menjabat sebagai Pimpinan Pusat Partai Politik telah menimbulkan polemik dalam tubuh internal Muhammadiyah sendiri. Disatu sisi ada yang kontra dengan sikap tersebut, sedangkan disisi lain ada yang mendukung Mas Mansur untuk tetap berada dalam konteks yang sudah dia ambil. Kelompok yang pro (setuju), menyerahkan kepada Mas Mansur sendiri untuk menentukan sikap politiknya, sedangkan yang kontra menghendaki agar Muhammadiyah terbebas dari pertikaian politik apapun dengan mengambil sikap netral terhadap semua partai politik. Berbagai polemik tersebut akhirnya diselesaikan dalam Sidang Majelis Tanwir Muhammadiyah pada 1939 yang akhirnya memutuskan untuk mengizinkan Mas Mansur duduk dalam pengurus pusat PII. Sidang Tanwir mengizinkan Mas Mansur untuk tetap menjabat dalam kepengurusan PII, tetapi Mas Mansur tidak mau terjadi pembelahan dalam Muhammadiyah, sehingga pada tahun 1940 dia memilih untuk mengundurkan dari pimpinan pusat PII dan hanya memposisikan dirinya sebagai penasehat PII.

Pada jaman Jepang, tepatnya pada 1943, MIAI berubah nama menjadi Masyumi dan nama ini diabadikan oleh pemimpin-pemimpin Islam Indonesia pada 7-8 November 1945 dengan mendirikan Partai Islam Masyumi.<sup>6</sup> Pada masa Jepang, Mas Mansur bersama Soekarno, Moh. Hatta dan Ki Hajar Dewantoro duduk dalam Putera (Pusat Tenaga Rakyat). Keempat tokoh itu kemudian dikenal dengan Empat Serangkai.<sup>7</sup> Deliar Noer mengatakan bahwa pengangkatan Mas Mansur dalam kelompok empat serangkai itu merupakan perkembangan yang unik dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Fenomena ini dapat dilihat sebagai pengakuan dari kalangan nasionalis dan juga pihak Jepang mengenai pentingnya kedudukan umat Islam dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Namun Mas Mansur juga sekali lagi mendapatkan kecaman dari berbagai kalangan dalam internal Muhammadiyah terkait sikapnya tersebut. Dr. Amrullah atau yang sering disebut Haji Rasul menegur Mas Mansur yang bekerjasama dengan pihak Jepang yang kafir dan sikap tersebut

---

<sup>5</sup> M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, terjemahan Dharmono Hardjowidjojo (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1995) Hlm. 260

<sup>6</sup> Ahmad Syafii Ma'arif, "Muhammadiyah dan High Politics," *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 2, Vol. VI, 1995.

<sup>7</sup> Lihat "Kata Pengantar" Syafii Ma'arif dalam Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*. Jakarta: Grafiti Press, 1997, hal. xii.

dianggap sebagai sikap yang membahayakan bagi perkembangan umat Islam di Indonesia.<sup>8</sup>

Perjalanan politik Masyumi tidak berjalan dengan mulus, jika Masyumi diibaratkan sebagai sebuah pesawat terbang maka NU dan Muhammadiyah menjadi kedua sayapnya. Muhammadiyah sebagai sayap modernis, sedangkan NU sebagai sayap tradisional. Kepengurusan dalam Pimpinan Masyumi lebih banyak didominasi oleh utusan Muhammadiyah yang mencapai lebih dari 50%.

**Tabel 1.**

**Proporsi Wakil Muhammadiyah dalam Pimpinan Pusat Masyumi<sup>9</sup>**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Anggota PP</b>	<b>Jumlah Wakil Muhammadiyah</b>	<b>Presentase Rata-rata</b>
1945	24 Orang	11 Orang	45,83 %
1949	14 Orang	4 Orang	28,57 %
1951	16 Orang	9 Orang	56,25 %
1952	13 Orang	7 Orang	53,85 %
1954	15 Orang	8 Orang	53,33 %
1956	19 Orang	12 Orang	63,16 %
1959	19 Orang	13 Orang	68,42 %
<b>Jumlah</b>	<b>120 Orang</b>	<b>66 Orang</b>	<b>55 %</b>

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa Muhammadiyah mendominasi kepemimpinan yang ada dalam Masyumi, apalagi setelah NU keluar pada tahun 1952 semakin didominasi oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah. Dominasi Muhammadiyah dalam tubuh Masyumi semakin menjadi-jadi setelah banyak anggota Istimewa Masyumi yang keluar, hingga akhirnya Masyumi dibubarkan oleh Soekarno melalui Dekrit Presiden Soekarno pada 1959.

Muhammadiyah dalam berjuang melalui politik praktis sangat maksimal, hal ini terlihat dari dukungan Muhammadiyah kepada Masyumi melalui kesepakatan pada Mukhtamar Muhammadiyah ke-32 di Purwokerto pada tahun 1953. Ada 4 kesepakatan yang dibuat oleh PP Muhammadiyah, Majelis Hikmah dan Pimpinan Ranting hingga Cabang untuk melakukan: 1. Bekerjasama dengan Komite Aksi Pemilihan Umum (KAPU), 2. Mengisi negara secara konkret dengan nafas Islam, 3. Mengusahakan satu daftar dari golongan Islam, dan 4. Mengusahakan satu front di Dewan dan Konstituante. Majelis Hikmah menindaklanjuti dengan membuat program untuk menyukseskan Pemilu 1955 bagi kemenangan Masyumi, antara lain

<sup>8</sup> M.T. Arifin. Op.cit. Hlm. 172

<sup>9</sup> Data diolah dari dua buku fenomenal; Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional* (Jakarta : Grafiti Press, 1987) Hlm. 100-104, dan Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi* (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1997), Hlm. 159.



dengan menyediakan petugas khusus untuk membantu Masyumi dalam menangani Pemilu. Bahkan Sidang Tanwir tersebut menginstruksikan kepada seluruh anggota di level ranting dan cabang untuk membantu KAPU Masyumi dan menusuk tanda gambar Masyumi pada Pemilu 1955.

Sejak Masyumi dibubarkan pada tahun 1960 hingga runtuhnya Demokrasi Terpimpin, Muhammadiyah pada khususnya dan Ummat Islam secara umum kehilangan saluran aspirasi politik formal mereka. Dalam tesisnya Sutrisno mengatakan bahwa Muhammadiyah mengalami tiga pilihan yang sangat sulit, pilihan-pilihan tersebut adalah; 1. Muhammadiyah melanjutkan perjuangan untuk melakukan rehabilitasi Masyumi, 2. Muhammadiyah berubah menjadi Partai Politik, dan 3. Muhammadiyah membentuk partai politik Islam baru yang memiliki kesamaan ideologi seperti Masyumi.<sup>10</sup> Akhirnya Muhammadiyah memilih alternatif nomor tiga dengan ikut membidangi lahirnya Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) pada 7 April 1967. Piagam pembentukan Parmusi ditandatangani oleh 16 Organisasi Islam yang tergabung dalam Badan Koordinasi Amal Muslim (BKAM), termasuk Muhammadiyah. Pemerintah melalui SK Presiden Soeharto No.70 Tahun 1968, menyetujui dan mengesahkan Parmusi yang dipimpin oleh Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun (Keduanya merupakan anggota dari Muhammadiyah) masing-masing menjabat sebagai Ketua dan Sekretaris.

#### **“Pernikahan Siri” Muhammadiyah dan Parmusi**

Perpolitikan dalam Muhammadiyah saat Orde Baru kembali diguncang, Dengan dibubarkannya Masyumi kelompok Islam kembali tidak memiliki wadah yang mewakili kelompoknya dalam pemerintahan, sejak itu kelompok Islam termasuk Muhammadiyah kembali membuat sebuah Partai pengganti Masyumi dan diberi nama dengan Parmusi. Parmusi berkembang sangat cepat, karena banyak aktivis politik Muhammadiyah yang tadinya aktif menjadi anggota Sekber Golkar berpindah ke Parmusi. Selain dari Muhammadiyah Parmusi juga didukung oleh organisasi Islam yang tergabung dalam Badan Koordinasi Amal Muslim (BKAM), termasuk didalamnya Muhammadiyah. Berdasarkan SK Presiden No. 70/1968 Parmusi resmi berdiri, dengan menempatkan duet Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun sebagai Ketua Umum dan Sekretaris.

Pada 2-7 November 1968 berlangsung Muktamar Parmusi I di Malang Jawa Timur. Dalam Muktamar yang berlangsung secara demokratis oleh peserta Muktamar ini terpilihlah

---

<sup>10</sup> Sutrisno, *Muhammadiyah dan Politik (Keberadaan, Sikap dan Pandangan Politik Muhammadiyah)*, (Tesis S2: Program Pasca Sarjana UGM, 1991) Hlm. 69

Muhammad Roem (Mantan Tokoh Masyumi) sebagai Ketua Umum Parmusi, keputusan ini bertentangan dan mengabaikan saran presiden agar tokoh yang di pilih menjadi ketua bukan tokoh Masyumi. Akibat dari ulah Parmusi ini muncul Radiogram pemerintah yang melarang *eks* pemimpin Masyumi untuk memegang posisi pimpinan Parmusi. Sehingga kepemimpinan dalam Parmusi tetap seperti SK Presiden No. 70/1968 yang mengesahkan kepemimpinan Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun sebagai Ketua dan Sekretarisnya.

Pada 5 Oktober 1970 terjadi pembajakan terhadap Parmusi pimpinan Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun yang dilakukan oleh J. Naro, Imron Kadir dan kawan-kawan. Mereka mengumumkan pimpinan Parmusi tandingan dengan J. Naro sebagai Ketua Umum dan Imron Kadir sebagai Sekretaris Umum. Pembentukan pemimpin tandingan tersebut dengan alasan bahwa pemimpin Parmusi telah menyimpang dari strategi partai karena telah membawa Parmusi terlibat dalam oposisi yang menentang pemerintah. Pembajakan ini dalam pandangan Samson didukung oleh kekuatan ABRI yang hendak memecah belah kekuatan politik Parmusi dari dalam, dengan menempatkan para loyalis Masyumi dan bersifat akomodatif, dengan cara ini ABRI telah melakukan intervensi langsung dalam proses pembajakan tersebut tanpa membuat kekacauan. Ini merupakan refleksi dari kebijakan ABRI yang menjadi kekuatan oposisi yang kuat dan independen terhadap kekuatan politik Islam. Dengan adanya Kudeta yang dilakukan oleh J. Naro-Imran dalam tubuh Parmusi, banyak menimbulkan konflik dan kemarahan para anggota Parmusi dan Ormas Islam lainnya. Maka dengan adanya kemelut dalam tubuh Parmusi tersebut pemerintah turun tangan untuk menyelesaikan konflik tersebut, walaupun kalau kita cermati pemerintah sendirilah yang menciptakan kekacauan tersebut.

Puncaknya adalah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden No. 77 tahun 1970 menetapkan Pimpinan Pusat Parmusi dengan Ketua Umum HMS Mintareja, dan Sekretaris Umumnya adalah dr. Sulastomo. Surat Keputusan Presiden tersebut tidak membuat konflik yang ada didalam tubuh Parmusi menjadi terselesaikan, bahkan menimbulkan kekecewaan seluruh jajaran Parmusi dari tingkat pusat hingga daerah. Disini Muhammadiyah sebagai ormas terbesar pendukung Parmusi juga sangat tidak puas dengan penunjukan HMS Mintareja sebagai ketua umumnya, karena kebijaksananya tidak sesuai dan sejalan dengan garis besar perjuangan Muhammadiyah. Salah satu kebijaksanaan yang menurut Muhammadiyah bertentangan dengan idealisme politik Muhammadiyah adalah



“kemenangan Golkar adalah kemenangan Parmusi.<sup>11</sup> Karakter sebagai politisi yang tidak mengenal kawan dan lawan ditunjukkan oleh Mintareja dengan melakukan *recall* Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun dari DPRGR/MPRS pada bulan Januari 1971. Semenjak terjadinya kudeta Naro 1970, kepemimpinan Parmusi tidak mengundang simpati umat, hal ini semakin membuat menjauhnya umat muslim dan Muhammadiyah untuk mendukung Parmusi. Orde Baru memberlakukan kontrol yang ketat terhadap kegiatan maupun pembentukan struktur kepemimpinan Partai ini. Dalam catatan lain, yaitu pemilu 1977 Parmusi hanya mendapatkan 5,36% suara, hal ini berbanding terbalik dengan apa yang dicapai oleh Masyumi dalam pemilu 1955 yang mendapatkan 20,9% suara.

Menurut Wertheim, kekalahan Parmusi disebabkan banyaknya kantong-kantong pendukung Masyumi yang berada di Jawa Barat beralih dukungannya kepada Golkar. Kemenangan Golkar dalam merebut dukungan umat muslim adalah dengan mengangkat isu tentang modernisasi dan pembangunan ekonomi. Sementara daerah Jawa Timur yang basis besarnya adalah NU, malah sedikit yang mendukung Parmusi. Masyarakat NU lebih banyak memilih Golkar. Golkar sendiri mendapat dukungan pada basis ini berasal dari eks pendukung PNI dan PKI. Selain sebab diatas ada beberapa sebab lain yang melatarbelakanginya kekalahan Parmusi, yaitu terbentuknya Parmusi berdasarkan SK Presiden dan kontrol ketat yang dijalankan oleh Presiden kepada Parmusi, serta kekecewaan kaum modernis terhadap kinerja Parmusi. Kegagalan ini yang membuat kecewa seluruh lapisan umat Islam termasuk Muhammadiyah, karena Parmusi yang diharap menjadi pengganti Masyumi malah kehilangan kewibawaan akibat kontrol yang ketat dari pemerintah. Sebab itu banyak pendukung Parmusi yang mengalihkan keterlibatannya dengan terlibat aktif kedalam lembaga dakwah, LSM, dan pergerakan Non-Politik lainnya. Atas berbagai konflik kepentingan yang berkepanjangan dan berbagai kekecewaan pada Parmusi inilah yang membuat Muhammadiyah memutuskan untuk tidak berhubungan dengan Partai Politik manapun.

Pada periode ini Muhammadiyah menegaskan bahwa kehadiran Parmusi sebagai kebutuhan yang konkret untuk melancarkan gerakan dakwah Muhammadiyah dalam konteks kebangsaan dan dikhususkan dalam konteks perpolitikan nasional. Keteguhan sikap politik Muhammadiyah ini dikuatkan dengan keputusan sidang Tanwir Muhammadiyah di Ponorogo di tahun 1969 bahwa “Partai Politik sebagai salah satu alat perjuangan dan kegiatan dakwah

---

<sup>11</sup> Allan A Samson. *Islam and Politics In Indonesia*. (Berkeley : University of California, 1972) . Hlm . 83-85

Muhammadiyah melalui saluran Politik”. Tetapi ketika Parmusi yang dipandang sebagai alat perjuangan dan kegiatan dakwah Muhammadiyah dibidang politik dilanda oleh konflik intern yang berkepanjangan. Tidak ada alasan lagi bagi Muhammadiyah untuk mempertahankannya dan lebih aman bagi Muhammadiyah pada saat itu untuk melepas hubungan dengan Parmusi. Atas pilihan politik tersebut, Muhammadiyah mengukuhkannya dalam Muktamar Muhamamdyiah ke-38 di Ujung Pandang pada 1971. Dalam Muktamar ini Muhammadiyah memutuskan untuk tidak terlibat lagi dalam politik praktis, bersikap netral dan tidak berhubungan dengan Partai politik manapun. Moment inilah yang menjadi titik balik (*the turning point*) bagi Muhammadiyah untuk kembali ke khittah awalnya sebagai gerakan sosial keagamaan yang berbasis pada sendi-sendi kultural bangsa. Perubahan orientasi Muhammadiyah ini nampak jelas karena ada trauma politik yang dialami oleh Muhammadiyah sebagai akibat dari persentuhannya dengan politik praktis melalui Masyumi dan Parmusi. Selain soal trauma diatas, hal lain yang membuat perubahan pada orientasi Muhammadiyah untuk kembali pada basis kultural adalah keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/1970 sebagai implementasi dari Undang-Undang (UU) No. 2/1970 mengenai kewajiban PNS untuk hanya memiliki loyalitas tunggal. Terbitnya PP tersebut jelas mempersempit gerak anggota Muhammadiyah yang aktif dalam Parpol khususnya Parmusi dan kemudian Partai Persatuan pembangunan (PPP) setelah fusi terbentuk dalam tahun 1973.<sup>12</sup>

Orientasi politik Muhammadiyah mengalami pergeseran dari orientasi sosial ke politis, meskipun muhammadiyah tetap dalam basis strategi kulturalnya. Perubahan ini dapat dilihat dari hasil Muktamar Muhammadiyah ke-43 di Banda Aceh pada tahun 1995, dengan terpilihnya H. Amin Rais sebagai Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jika kita melihat perubahan orientasi yang terjadi maka, dapat dilihat dari dua perspektif dorongan internal Muhammadiyah dan juga kondisi eksternal bangsa Indonesia pada era ini. Faktor internal yang mendorong perubahan tersebut adalah pribadi dari Amin Rais, selaku cendekiawan politik yang concern dengan permasalahan nasional, khususnya permasalahan ketidakadilan dan kesenjangan yang menimpa kaum *dhu'afa* sebagai akibat dari merajalelanya kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam pengamatan Ahmad Syafii Maarif dibawah kepemimpinan Amin Rais, adalah untuk pertama kalinya Muhammadiyah dipimpin oleh “orang sekolahan” (cendekiawan bukan ulama’ tradisional). Fakta membuktikan bahwa

---

<sup>12</sup> M. Rusli Karim, *HMI MPO Dalam Kelut Modernisasi Politik Indonesia* (Bandung : Mizan, 1997) Hlm. 174

dibawah pimpinan Amin Rais Muhammadiyah mampu memimpin arus utama (*mainstream*) panggung politik nasional, menjadi “lokomotif” reformasi yang ikut menumbangkan otoritarianisme Orde Baru bersama komponen lainnya seperti mahasiswa, LSM, cendekiawan dan rakyat.<sup>13</sup> Orientasi politis Muhammadiyah, walaupun masih berbasis kultural sejak 1995 sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan, visi dan penguasaan mendalam Amin Rais atas data sosial. Hal inilah yang membedakan perilaku politik Muhammadiyah dengan masa-masa sebelumnya (periode 1971-1995) pada masa AR. Fachruddin dan Ahmad Azhar Basyir. Hal ini dapat dilihat dari pribadi Amin Rais yang lebih terbuka (inklusif), terus terang/vokal, sementara figus ketua PP sebelumnya cenderung tertutup (eksklusif), hati-hati terhadap pemerintahan.

### **“Pernikahan Mut’ah” Muhammadiyah dan PAN (Partai Amanat Nasional)**

Muktamar ke-38 di Makassar 1971 dalam implementasinya tidak mampu membendung dan menertibkan warga Muhammadiyah dalam kegiatan politik praktis. Muhammadiyah secara kelembagaan mulai melakukan upaya-upaya konseptual dalam mengawal proses reformasi, melalui Tanwir 1998 di Semarang terlihat bahwa Muhammadiyah tidak ingin membawa gerbong organisasi ini ke arah politik praktis. Adapun warga Muhammadiyah yang aktif dalam kegiatan politik praktis itu merupakan pihan individu bukan pilihan organisasi, secara umum warga Muhammadiyah lebih memilih partai- partai yang memiliki basis masa Islam, seperti PAN, PKS, PBB, PPP, PD dan Golkar. Muhammadiyah juga memunculkan sikap nahi munkar nya, dengan menyerukan kepada anggotanya untuk tidak memilih partai sekuler yang tidak membawa visi-misi dan nilai-nilai Islam, hal ini dapat dilihat dari seruan PP Muhammadiyah 31 Mei 1999; “Pertama, menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Umum dengan sebaik- baiknya dan bertanggung jawab sesuai dengan hati nurani serta hak asasi sebagai warga negara; kedua, wajib memilih salah satu partai politik peserta Pemilu Umum yang mewakili kepentingan Umat Islam yang betul-betul memperjuangkan reformasi; dan ketiga, jangan memilih partai politik yang mayoritas calon legislatifnya tidak membawa aspirasi dan memperjuangkan kepentingan umat Islam.”<sup>14</sup>

Pada tanggal 23 Agustus 1998 bertempat di Jakarta, Amien Rais dengan teman-temannya mendeklarasikan berdirinya Partai Amanat Nasional (PAN). Langkah Amien Rais itu sendiri untuk mengakomodir keinginan dan kepentingan warga Muhammadiyah yang

<sup>13</sup> Suwarno, *Muhamadiyah Sebagai Oposisi, Studi Tentang Perubahan Perilaku Politik Muhammadiyah periode 1995-1998* (Jogjakarta : UII Press, 1997) Hlm. 49

<sup>14</sup> PP Muhammadiyah “Seruan”, tanggal 31 Mei 1999, di tanda tangani oleh Pj. Ketua Ahmad Syafii Maarif dan Sekretaris Muchlas Abror.

sejak lama berada dalam kungkungan Orde Baru. Berdirinya PAN yang bersifat terbuka dan majemuk serta tidak membatasi dukungan dari kalangan Muhammadiyah saja. Setidaknya ini adalah satu langkah yang positif bagi kalangan Muslim untuk terbuka terhadap kalangan Non-Muslim, dan langkah ini juga memberikan kesan positif dari pihak Non-Muslim yang merasa PAN adalah partai Muhammadiyah. Kelahiran PAN tidak ada hubungannya dengan Muhammadiyah sekalipun seringkali dikaitkan, tetapi hubungan itu lebih merupakan hubungan keterikatan moral-politik dan historis.<sup>15</sup> Hal ini sejalan dengan hasil keputusan Sidang Tanwir yang memberikan amanat kepada PP untuk melakukan dua hal; "Pertama, melakukan ijtihad politik guna mencapai kemaslahatan nasional dan bangsa secara maksimal, yang senantiasa dilandasi semangat Islam amar ma'ruf nahi munkar; kedua, menyusun agenda reformasi (konsep dan strategi reformasi Muhammadiyah) diberbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara menuju makin cepat terwujudnya masyarakat utama yang sejahtera.

Amanah dari Tanwir untuk melakukan ijtihad politik inilah yang ditafsirkan oleh elite-elite PAN sebagai bentuk keterlibatan Muhammadiyah dengan PAN. Bentuk dari ijtihad tersebut tidak dengan Muhammadiyah terlibat langsung membentuk partai politik, tetapi lebih kepada mendorong Amin Rais sebagai representasi dari Muhammadiyah dalam proses politiknya. Pada prinsipnya pola hubungan Muhammadiyah dengan PAN adalah sama dengan pola hubungan Muhammadiyah dengan partai politik lainnya, bersifat longgar dan tidak memiliki ketentuan baku yang perlu ditaati, tidak ada hubungan yang bersifat struktural dan organisatoris. Sejarah berdiri dan berkembangnya PAN sulit dihindarkan dari dukungan warga Muhammadiyah untuk mendirikan partai ini. Dengan melihat data empiris keterlibatan SDM, sarana, elite serta warga Muhammadiyah dalam kegiatan PAN, sulit sekali dihindarkan kesan bahwa PAN bukan sebagai "partai Muhammadiyah". Sebagai contoh kecil di Bima, PAN awalnya memperoleh dukungan yang kuat dari Muhammadiyah, mulai dari awal berdirinya sudah banyak menggunakan fasilitas milik pimpinan Muhammadiyah di daerah Bima. Amal usaha Muhammadiyah serta seluruh anggotanya memberi dukungan penuh kepada PAN di Bima, tetapi seiring berjalannya waktu dukungan kepada PAN mulai rasional dan tidak sefanatik pada masa awal berdirinya PAN di Bima.<sup>16</sup>

Pernyataan Amin Rais ini menunjukkan bahwa pendirian PAN hanya hasil ijtihad dirinya dan beberapa orang yang setuju dengan platform PAN, bukan merupakan hasil ijtihad

---

<sup>15</sup> Haedar Nashir, *Perilaku Politik Elit Muhammadiyah* (Yogyakarta: Tarawang, 2000) Hlm.212

<sup>16</sup> Syarifuddin Jurdi, *Perubahan Perilaku Politik Elite Muhammadiyah Pasca Orde Baru di Bima* (Yogyakarta : Tesis S2 UGM, 2002)

Muhammadiyah. Dengan alasan ini maka warga Muhammadiyah dibebaskan untuk menentukan sikapnya, baik mendukung PAN ataupun partai politik lain. Penegasan dari Amin Rais ini merupakan pemahaman dan harapannya kepada Muhammadiyah agar tetap eksis sebagai kekuatan Islam yang selalu eksis di masa depan. Relasi Muhammadiyah dengan partai politik bersifat fungsional, apabila ada proses legislasi dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam, maka Muhammadiyah dapat melakukan lobi dengan parlemen maupun pemerintah. Secara personal, kader-kader Muhammadiyah yang masuk dan aktif dalam partai politik adalah sebagai berikut; di PAN, misalnya Amin Rais, Amin Aziz, Dawam Rahardjo, AM Fatwa. Yusril Ihza Mahendra dan lain-lain di PBB, Rusdi Hamka, Fauzi AR, Syukri Fadholi dan lain-lain di PPP, Hidayat Nurwahid dan beberapa tokoh muda di PKS, di Golkar Hajriyanto Thohari, sementara Marzuki Usman, Muslim Abdurrahman dan Habib Chirzin di PKB serta Muhtar Buchori dan Herry Achmadi di PDI-P.<sup>17</sup>

Fakta yang ditunjukkan oleh Muhadjir Efendi ketika mengatakan bahwa suara yang diperoleh PAN dalam Pemilu 1999 sebanyak 7 juta itulah yang nyata warga Muhammadiyah, atau mungkin suara yang diperoleh oleh Amin Rais dalam Pilpres 2004 dapat dianggap sebagai jumlah warga Muhammadiyah. Dengan meletakkan ini jauh dari realistis maka tidak perlu lagi ada klaim dari warga Muhammadiyah dengan jumlah anggota hingga 25-30 juta jiwa kalau kenyataan politik yang dihasilkan tidak menunjukkan signifikansi jumlah tersebut, bahkan separuhnya saja tidak sampai.<sup>18</sup> Muhammadiyah dalam Sidang Tanwir di Bali 2002 membangun sebuah kerangka yang bagus dalam upaya membentuk hubungan yang harmonis dengan Politik, utamanya Partai Politik PAN. Walaupun dalam periode-periode sebelumnya PP mengeluarkan pernyataan bahwa Muhammadiyah tidak terkait dengan partai politik manapun, tetapi fakta menunjukkan bahwa PAN mengakomodasi warga Muhammadiyah. Bahkan PAN disusulkan sebagai partai utama warga Muhammadiyah, Din Syamsuddin menyatakan bahwa ; Bertolak dari satu keprihatinan masa depan, sementara ini ada mobilisasi Muhammadiyah (masuk PAN) karena (PAN) dipimpin oleh orang-orang Muhammadiyah ditempat-tempat tertentu. Tetapi, kalau untuk jangka panjang partai ini dibawa lari oleh orang lain, ini ironi.<sup>87</sup>

Meskipun keterlibatan politik warga Muhammadiyah merupakan proyek amal politik dan hak asasi manusia, tetapi Syafii Maarif mengakui bahwa banyak kader Muhammadiyah

---

<sup>17</sup> Keputusan Sidang Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diperluas di Jakarta 22 Agustus 1998 (Yogyakarta : Pimpinan Pusat Muhammadiyah)

<sup>18</sup> Muhadjir Efendi, *Masyarakat Equilibrium* (Yogyakarta : Benteng, 2004)

yang terlibat dalam kepengurusan PAN. Sebagaimana pernyataan kritis Syafii Maarif melihat kondisi pola hubungan politik Muhammadiyah dan PAN adalah sebagai berikut “Muhammadiyah masih bisa menjaga jarak dengan kekuatan politik formal, termasuk PAN yang sebagian pengurusnya orang Muhammadiyah. Walaupun elit-elite Muhammadiyah mengatakan bahwa Muhammadiyah jauh dari politik praktis, tetapi dalam kenyataan sebagian besar ranting dan cabang PAN di daerah berdiri atas inisiatif warga Muhammadiyah. Menjelang Pemilu 2004 Muhammadiyah menunjukkan sikap partisannya dengan seolah memberikan sinyal kepada warganya untuk memilih PAN. Pernyataan resmi Muhammadiyah yang dihasilkan melalui rapat pleno PP dengan mengeluarkan seruan untuk memilih partai yang memberi peluang bagi terpilihnya kader-kader Muhammadiyah serta “instruksi” memilih calon DPD yang direkomendasikan oleh Muhammadiyah, dari data ini dapat dilihat bahwa Muhammadiyah aktif dalam menggerakkan warganya untuk memilih para representator Muhammadiyah dalam Parlemen.

Pemilu legislatif dan Pilpres 2004 menunjukkan bagaimana perilaku politik Muhammadiyah yang partisan, ditunjukkan dalam pemilu legislatif banyak sekali calon-calon legislatif dari warga Muhammadiyah, kemudian dalam Pilpres warga Muhammadiyah mengerahkan segala kekuatan fisik, materi dan SDM nya untuk mendukung Amin Rais. Tetapi fakta menunjukkan bahwa banyak kekecewaan terjadi hanya sedikit sekali calon-calon legislatif Muhammadiyah yang terpilih menjadi anggota legislatif. Untuk kader Muda yang terpilih sebagai wakil rakyat dari PAN, utamanya yang masuk dalam struktur kepemimpinan PP Pemuda Muhammadiyah hanya terdapat 5 orang, diantaranya; Muhammad Mirdasy dan Suyoto (DPRD JATIM); Uum Syarif Usman (DPRD JABAR); Andi Harun (DPRD KALTIM); dan Azwir Sirau (DPRD Lampung).

Komposisi keterwakilan inilah yang memicu reaksi dan protes dari Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM), sehingga membawa hubungan Muhammadiyah dan PAN menjadi dilema. Hal ini di picu oleh unsur kekecewaan dari AMM kepada PAN; pertama, tidak mencerminkan “unsur keadilan” dan kedua, PAN tidak aspiratif terhadap Muhammadiyah yang selama ini menjadi diklaim sebagai basis utama massa bagi PAN. Problem tersebut semakin meruncing pada Sidang Tanwir Pemuda Muhammadiyah 7-10 Oktober 2004 di Banjar Baru Kalimantan Selatan yang memutuskan dua alternatif dalam kaitannya dengan politik, kedua opsi tersebut adalah dengan membentuk partai baru atau mengalokasikan dukungan politiknya kepada partai politik lain. Secara lengkap aturan dari keputusan Tanwir Muhammadiyah di Mataram terkait dengan isu akan adanya pendirian Partai Politik baru



dikalangan Muhammadiyah adalah sebagai berikut; “Berkait dengan dinamika politik internal Muhammadiyah pasca Pemilu 2004, Tanwir dapat menangkap dan mencatat munculnya keinginan atau aspirasi warga Muhammadiyah terutama dari Angkatan Muda Muhammadiyah untuk mendirikan partai politik baru. Tanwir berpandangan bahwa gagasan tersebut hendaknya dipertimbangkan secara lebih matang dan tidak terburu-buru karena pendirian partai politik harus didasarkan pada pemikiran yang mendalam dan bukan karena alasan kekecewaan atau sekedar keinginan untuk memperebutkan kursi kekuasaan politik. Tanwir memberi kesempatan kepada Angkatan Muda Muhammadiyah untuk menindaklanjuti dan mengkaji gagasan tersebut secara lebih komprehensif dengan selalu memerhatikan nilai-nilai dasar persyarikatan tidak menyeret Muhammadiyah dalam politik praktis.”<sup>19</sup>

Pemilu 2004 memposisikan Muhammadiyah sebagai “partisan”, tujuan dari sikap ini adalah agar terdapat perbaikan bangsa dan segera keluar dari krisis yang belum kunjung berakhir. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa “gairah” Muhammadiyah dalam pemilu 2004 menjadi momentum untuk menggerakkan potensi khususnya dibidang politik. Keterlibatan Muhammadiyah dalam Pilpres 2004 tampak dalam pernyataan dukungannya terhadap Amin Rais. Dalam Sidang Pleno diperluas yang diadakan pada 9-10 Februari 2004 di Yogyakarta telah mengambil sikap atau keputusan; “Pertama, mendukung sepenuhnya langkah Prof. Dr. H.M. Amien Rais selaku kader terbaik dan mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta tokoh reformasi untuk memperjuangkan kelanjutan reformasi dan penyelamatan bangsa dalam pemilihan Presiden pada Pemilu 2004. Kedua, Presiden Indonesia yang diharapkan terpilih dalam pemilu 2004 untuk memperjuangkan kelanjutan reformasi dan penyelamatan bangsa adalah tokoh yang reformis, bersih dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik, memiliki visi kebangsaan yang luas, tegas dan berwibawa dalam membawa bangsa ke tengah pergaulan internasional, mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memajukan kehidupan bangsa menuju kemasadepan yang lebih baik. Ketiga, meminta kepada warga Muhammadiyah dan mengajak kepada masyarakat untuk mendukung terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden yang dapat mengemban amanat reformasi serta penyelamatan bangsa.”<sup>20</sup>

### **“Perceraian” Muhammadiyah tidak Berpolitik Praktis**

---

<sup>19</sup> Suara Muhammadiyah No. 01/Th. Ke-90, 1-15 Januari 2005, Hlm. 8, Bagian Suplemen. Rekomendasi Tanwir Mataram.

<sup>20</sup> Sidang Pleno PP diperluas tentang Kebijakan Muhammadiyah menghadapi Pemilu 2004, Keputusan penting itu terkait dengan posisi kader terbaiknya dalam menyongsong Pilpres langsung, dimana Amin Rais ikut memperebutkan kursi Kepresidenan.



Perceraian antara Muhammadiyah dengan Partai Politik di Mulai sejak adanya Khittah Denpasar pada tahun 2002 yang memberikan panduan tentang bagaimana warga Muhammadiyah harus berpolitik. Dalam khittah ini dijelaskan bahwa Muhammadiyah tidak memiliki hubungan organisatoris dengan partai politik manapun dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis serta memberi kebebasan kepada warga Muhammadiyah untuk memilih atau tidak memilih berpolitik praktis. Khittah Denpasar lebih lengkap dalam memberikan panduan tentang bagaimana warga Muhammadiyah harus hidup berbangsa dan bernegara. Khittah ini juga memberi jalan keluar tentang sikap netral Muhammadiyah dalam politik praktis, sehingga Muhammadiyah tetap bisa berkiprah dalam dinamika kebangsaan tanpa terjebak pada fungsi partai politik.

Relasi hubungan antara partai politik dan Muhammadiyah tidak berjalan mulus, partai mengabaikan posisi netral Muhammadiyah dan partai berusaha untuk melakukan aktivitas politiknya ke dalam “Rumah” Muhammadiyah. Munculnya infiltrasi partai kedalam tubuh Muhammadiyah, mendorong gerakan ini untuk melakukan revitalisasi organisasi, dengan tujuan untuk menguatkan komitmen bermuhammadiyah ditengah pengikisan komitmen dalam menggerakkan organisasi. Revitalisasi merupakan program pasca Muktamar Malang 2005, menurut Haedar Nashir aspek yang paling utama direvitalisasi adalah ideologi atau komitmen bermuhammadiyah. Hal ini sangat penting karena menurutnya gerakan tarbiyah dan juga PKS kedalam tubuh Muhammadiyah.

Pemilihan Presiden 2004 telah membentuk “faksi-faksi” politik internal Muhammadiyah yang terbagi dalam dua faksi; *pertama*, mereka yang menghendaki Muhammadiyah lebih berani memasuki ranah politik praktis, dengan mengajak warganya untuk menunjuk dan memilih kader-kader terbaiknya menjadi pemimpin di negeri ini. *Kedua*, kelompok yang menghendaki Muhammadiyah secara organisasi tetap melakukan *political engagement* terhadap politik praktis dan tidak terlalu tergoda oleh perebutan jabatan kekuasaan (kepemimpinan nasional). Tetapi pilihan untuk menjaga dan memelihara pluralitas pemikiran anggota, menjaga independensi kultural dan konsistensi Muhammadiyah sebagai basis *civil society* merupakan jalan paling menyelamatkan untuk ditempuh dalam kondisi politik apapun.

Sikap politik Muhammadiyah mengerucut pada sikap politik yang pertama, yakni mengarahkan Muhammadiyah sebagai “mesin politik” yang bermuara pada pragmatisme

politik.<sup>21</sup> Hal ini bisa dilihat dari keberadaan PAN yang terus menyedot energi dan konsentrasi warga Muhammadiyah mulai dari tingkat pusat hingga ranting meski ada jarak antara PAN dan Muhammadiyah. Padahal jika kita menengok kebelakan menjelang pemilu 1999, PP Muhammadiyah mengeluarkan edaran untuk tetap menjaga jarak yang sama terhadap partai politik dan larangan jabatan rangkap dengan partai politik, serta larangan penggunaan fasilitas Muhammadiyah oleh partai politik mana pun. Lepas dari efektif atau tidaknya dukungan politik tersebut, kini muncul gejala bahwa independensi kultural Muhammadiyah tergoyah oleh rayuan, syahwat, dan kepentingan politik praktis. Muhammadiyah yang juga menjadi elemen terbesar dari *civil society* terasa kurang konsisten pada pemberdayaan masyarakat sipil. Dampak lebih jauh adalah rentannya konflik kepentingan di kalangan aktivis. Akibatnya, tidak saja menjadikan warga Muhammadiyah sebagai tumbal kepentingan politik, melainkan juga proyek penguatan *civil Islam* yang selama ini dilakukan menjadi terbengkalai. Kalaupun berpolitik, karena dipaksa sejarah, hendaklah kekuasaan tidak menjadi wacana sentral dalam kesadaran warganya sehingga mengabaikan “kewajiban” asasinya sebagai kekuatan Islam kultural. Bayang-bayang politik dan kekuasaan yang menjanjikan keuntungan tidak seharusnya menjerumuskan Muhammadiyah kedalam pragmatisme politik.

Sikap politik Muhammadiyah merupakan hal yang biasa dalam sistem politik demokrasi, namun dukungan tersebut haruslah mencerminkan semangat kelembagaan dan jatidiri organisasi. Pilpres 2004 membawa implikasi bagi dinamika internal Muhammadiyah karena jarak antara Muktamar dengan Pilpres hanya setahun, apalagi Pilkada langsung sejak Juni 2005 yang juga memperkuat dinamika internal Muhammadiyah. Dalam menyikapi kegagalan tersebut Muhammadiyah menyampaikan pernyataan yang diringkas dalam paragraf ini; “Pertama, pada Pilpres 20 September 2004, memberikan kebebasan kepada warga Muhammadiyah untuk menggunakan hak politik sesuai nurani dan pikiran yang cerdas disertai istikharah dan kemampuan membaca peta politik yang akurat. Kebebasan menggunakan hak pilih seperti ini dimaknai sebagai wujud akuntabilitas politik yang objektif kepada bangsa sekaligus pertanggungjawaban amanah kepada Allah SWT. Kedua, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengharapkan agar aspirasi rakyat yang sangat berharga itu benar-benar dijadikan mandat politik yang wajib ditunaikan sebagaimana misi, visi dan janji-janji yang ditawarkan pada masa kampanye. Pasangan Capres dan Cawapres harus juga

---

<sup>21</sup> Muhammadiyah dalam Bayang-bayang Politik Praktis, dalam islamlib.com di Akses pada, 17-02-2015, 08:16 WIB.

mengutarakan kepada publik mengenai kebijakan penting dan strategis yang akan dilakukannya baik menyangkut kebijakan dalam negeri maupun yang berkaitan dengan rakyat dalam negeri. Ketiga, Komisi Pemilihan Umum harus bersikap independen dan membuka diri pada kritikan dan perbaikan. Keempat, kepada kekuatan nasional dan anak bangsa untuk mengedepankan sikap kritis dan melakukan kontrol politik yang objektif dalam mengawal pemerintahan baru hasil Pemilu 2004 agar kekuasaan tidak berjalan sewenang-wenang dan dapat dihidmatkan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan bangsa. Bagi Muhammadiyah sikap seperti itu merupakan wujud dari pelaksanaan Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”<sup>22</sup>

### Refleksi Akhir

Merujuk pada perjalanan sejarahnya, Muhammadiyah tidak mungkin menghindarkan diri dari arena politik, meskipun harus tetap istiqamah untuk tidak terjun dalam kancah politik praktis. Data-data di atas menunjukkan bahwa kekuatan massa Muhammadiyah tidak dapat dipandang enteng. Kekuatan itu pernah membawa Masyumi muncul sebagai salah satu pemenang pemilu bersama PNI. Tetapi dalam perjalanannya, kekuatan politik Muhammadiyah sulit untuk disatukan hanya dalam satu partai politik sebagaimana Masyumi di tahun 50-an. Sehingga keluar jargon : Menjaga kedekatan yang sama dengan semua parpol.

Artikulasi kepentingan politik Muhammadiyah sangat ditentukan gaya kepemimpinan tokoh sentralnya dalam merespon dinamika politik nasional yang terjadi pada masanya. Tetapi dalam realitasnya walaupun dukungan itu dikatakan sebagai dukungan pribadi, tetapi sulit untuk bisa antara elite tersebut secara individu dan secara Muhammadiyah kelembagaan. Jargon yang selama ini digunakan oleh sementara pimpinan Muhammadiyah sudah tepat: Menjaga kedekatan yang sama dengan semua parpol” merupakan ijtihad politik yang sangat baik asal si pemimpin konsisten dengan jargon itu.

### Daftar Pustaka

- Arifin, MT. 1990. *Muhamamdiyah Potret yang berubah*. Surakarta : Institut Gelanggang Pemikiran Filsafat Sosial Budaya dan Pendidikan.
- Alfian. 1989. *Muhammadiyah The Political Behavior of A Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

---

<sup>22</sup> Zul Asmal Tanjung, *Memilih Pemimpin*”, Naskah Khutbah Jum'at, Lihat Suara Muhammadiyah, No. 12, Th. Ke-89, 16-30 Juni 2004 M, Hlm. 3

- Efendi, Muhadjir. 2004. *Masyarakat Equilibrium*. Yogyakarta : Bentang.
- Jinan, Mutoharrun. 2004. *Muhammadiyah dalam Bayang-bayang Politik Praktis*, dalam Media Indonesia, Jum'at, 30 April 2004.
- Jurdi, Syarifuddin. 2002. *Perubahan Perilaku Politik Elite Muhammadiyah Pasca Orde Baru di Bima*. Yogyakarta : Tesis S2 UGM.
- Karim, M. Rusli, 1997. *HMI MPO Dalam Kemelut Modernisasi Politik Indonesia*. Bandung : Mizan.
- Keputusan Sidang Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diperluas di Jakarta 22 Agustus 1998 (Yogyakarta : Pimpinan Pusat Muhammadiyah).
- Ma'arif, Ahmad Syafii. 1995. "Muhammadiyah dan High Politics," *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 2, Vol. VI, 1995.
- Nagazami, Akira. 1989. *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia Budi Utomo 1908-1918*. Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti.
- Nashir, Haedar. 2000. *Perilaku Politik Elit Muhammadiyah*. Yogyakarta: Tarawang.
- Noer, Deliar. 1987. *Partai Islam di Pentas Nasional*. Jakarta : Grafiti Press.
- Ricklefs, M. C. 1995. *Sejarah Indonesia Modern*, terjemahan Dharmono Hardjowidjojo. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Samson, Allan A. 1972. *Islam and Politics In Indonesia*. Berkeley : University of California.
- Suara Muhammadiyah No. 01/Th. Ke-90, 1-15 Januari 2005, Hlm. 8, Bagian Suplemen. Rekomendasi Tanwir Mataram.
- Sutrisno. 1991. *Muhammadiyah dan Politik (Keberadaan, Sikap dan Pandangan Politik Muhammadiyah)*, (Tesis S2: Program Pasca Sarjana UGM).
- Suwarno. 1997. *Muhamadiyah Sebagai Oposisi, Studi Tentang Perubahan Perilaku Politik Muhammadiyah periode 1995-1998*. Yogyakarta : UII Press.
- Syaifullah. 1997. *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*. Jakarta: Grafiti Press.
- Tanjung, Zul Asmal. 2004. *Memilih Pemimpin*", Naskah Khutbah Jum'at, Lihat Suara Muhammadiyah, No. 12, Th. Ke-89, 16-30 Juni 2004 M.